

Edisi XVIII-2025

Infosheet

SORA KEKELENGEN

Untuk Kalangan Sendiri



Kantor Yayasan Ate Keleng GBKP

Alamat :

**Jl. Jamin Ginting KM 45
Desa Sukamakmur, Kec. Sibolangit
Kab. Deli Serdang, 20357
Sumatera Utara, Indonesia**



Yayasan Ate Keleng GBKP



Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP



yakparpem.org



Yayasan Ate Keleng GBKP

Tim Redaksi

Penanggung Jawab -

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si.Theol.,MADM

Redaksi Pelaksana -

Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

Design Graphics / Editor -

Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

Distributor & Kontributor -

Guntur Tarigan
Windi Karolina Yoanita, SE
Dini Christ Moriani Br Tarigan, SP
Corry Anggreyny br Ginting, S.Hut
Jenni Efrida Br Sembiring, S.Pd
Selly Evianta, SM
Rima Hosiana Br Ginting, S.Pd
Indah Permatasari Br Tarigan, S.Sos
Timotius Natanael Perangin-angin,S.Hut
Lestari Br Sitepu, SE

- Pemimpin Redaksi

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si.Theol.,MADM

- Staf Redaksi

Rupina Br Purba, S.PAK
Eninta Barus, S.Sos
Vionna Clarissa Br Ginting, S.H
Silvia Agnes Yolani, SPT
Sriulina Br Sembiring, S.Tr.P
Yuni Sartika Ginting, SE
Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom

- Keuangan

Dea Dwinta Putri Br Bangun, SE
Egia Nina Veronika, Amd
Priska Tarigan, S.Kom

Ir. Leader Suriawan Tarigan
Adi Anggraha Tarigan, S.Hut
Kaisar Tarigan
Armin Ginting
Jusmiaty Br Tarigan
Lasendri Br Tumanggor
Esterina Br Tarigan
Abdi Tarigan
Lesmawati Br Perangin-Angin, Amd

Alamat Redaksi

Jl. Jamin Ginting Km. 45 Desa Sukamakmur, Kecamatan
Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, 20357 Sumatera Utara
Indonesia

 (0628) 97267 |  0821 6555 2744

Berita Redaksi

Pdt. Yusni Rut Mentina Br Pandia, S.Si,Theol.,MADM.

(Direktur Eksekutif YAK/Parpem GBKP)

Salam Sejahtera bagi seluruh pembaca Sora Kekelengen yang setia,

Syukur yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas ijinNya kita masih memiliki kesempatan hidup dan melayani sampai saat ini di Yayasan Ate Keleng/Parpem GBKP dan di bidang kerja pelayanan kita masing-masing. Melalui meja redaksi, kami menyapa seluruh pembaca yang setia dengan hangat dan semoga para pemcaba semua ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta selalu ada spirit membaca karya tulisan-tulisan yang ada pada *infosheet*/buletin Sora Kekelengen kita ini .

Adapun tujuh tulisan yang akan disajikan bagi seluruh pembaca buletin Sora Kekelengen edisi ke XXVIII kali ini adalah tentang beberapa tema dan topik yang menarik untuk dibaca sesuai dengan progress kerja pelayanan di YAK GBKP melalui divisi-divisi kerjanya. Tim penulis kali ini juga beragam dari divisi yang berbeda yang tetap semangat dalam menuangkan pengalaman dan kapasitas menulisnya yang diperoleh dari pelayanan pemberdayaan di tengah masyarakat dampingan dari berbagai bidang. Tulisann-tulisan artikel yang kami sajikan selalu dan selalu seputar tema kerja-kerja pelayanan pemberdayaan masyarakat oleh YAK/Parpem GBKP. Karya tulisan-tulisan pada edisi ini adalah tentang update refleksi dan berita perjuangan hak atas tanah masyarakat di Rambung dan Bingkawan dengan judul *Rambung Baru dihantui Pengusuran untuk Tempat “Orang Mati*. Selanjutnya ada tulisan tentang Desa dengan masyarakatnya mampu menjadi Desa yang menuju inklusi yang harus dipraktekkan seiringan dengan aturan/regulasi mengkonkritkan praktek inklusi itu di leve desa bersama para Pemdes yang mengikuti Studi Banding ke Yogyakarta dengan judul *Menuju Desa Inklusi: Studi Banding Pemerintahan Desa ke Yogyakarta*. Praktek Desa Menuju Inklusi tersebut senada dengan kerja-kerja pemberdayaan kelompok marginal yang ada di Desa yang ada dalam tulisan dengan judul *Memberdayakan Kelompok Marginal dalam Pembangunan Desa*.

Tulisan menarik dan penting lainnya juga kita temukan dalam buletin ini tentang *Mengubah Limbah Rumah Tangga menjadi Energi di OR Lau Kelumat, Koperasi Kredit Sokong Ekonomi Masyarakat, Fungsi Digitalisasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Digitalization for Justice and Peace)*. Tulisan terakhir adalah tentang *Langkah Awal dalam Memulai Perubahan Besar "Ending Plastic Pollution"*. Tentu tulisan demi tulisan tersebut semua akan lebih jelas dan menarik ketika kita membaca secara lengkap di setiap halaman tema dan topiknya. Kami yakin para pembaca setia kami juga sudah penasaran dan sudah tidak sabar untuk membaca, belajar bersama dan juga mendapatkan informasi terupdate untuk beberapa kerja pelayanan YAK/Parpem GBKP pada edisi Sora Kekelengen kali ini. Melalui semua tulisan artikel yang sudah ada pada edisi ke XXVIII ini, kiranya dapat menambah semangat, kekuatan, komitmen, kesetiaan, ilmu, informasi, pemahaman yang kuat dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat dari berbagai bidang yang dikerjakan oleh YAK/Parpem GBKP. Semoga peran dan kerja kita bersama dalam meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian organik, lingkungan, sosial politik/advokasi, ekonomi dan bidang lainnya bagi masyarakat semakin baik, berdampak dan berkelanjutan tetap hidup pada masyarakat dampingan dan diluar dampingan YAK/Parpem GBKP. Selamat membaca dan akhir kata kami berterimakasih bagi seluruh tim Sora kekelengen dan seluruh pembaca yang setia.

Kami juga berharap agar pembaca Sora Kekelengen mengunjungi website YAK/Parem GBKP di www.yakparpem.org. Facebook di YayasanAteKeleng/PARPEMGBKP dan IG di YayasanAteKelengGBKP. Di sana Anda sekalian bisa mendapatkan edisi-edisi lampau, ikut serta dalam diskusi, bahkan berlangganan dan membaca beberapa artikel yang khusus diterbitkan di media online ini. Jika Anda mempunyai masukan, pertanyaan, artikel, ataupun resensi buku, Anda bisa mengirimkannya ke redaksi ke YayasanAteKelengGBKP@protonmail.com.

Demikianlah penghantar Sora Kekelengen dengan sangat bangga kami sampaikan terimakasih, Tuhan Yesus Kristus beserta kita dan memberkati kita sekalian. Amin

Rambung Baru dihantui Penggusuran untuk tempat ‘Orang Mati’

Oleh : Eninta, S.Sos

Sumatera Utara merupakan provinsi yang senantiasa menyumbangkan angka konflik agraria yang tinggi di setiap tahunnya. Hingga bulan September di tahun 2024 Konflik agraria tersebut hampir dipastikan selalu disertai dengan kekerasan aparat, perampasan tanah, pemiskinan, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya. konflik agraria yang terjadi merupakan warisan konflik yang telah terjadi puluhan tahun lamanya. Tanpa ada upaya penyelesaian konflik,



Tingginya konflik agraria di Sumatera Utara, selain oleh karena warisan konflik di masa silam, juga disebabkan oleh ambisi pembangunan Pemerintahan Joko Widodo yang diarahkan untuk dapat meliberalisasi sumber-sumber agraria. Sumatera Utara menjadi sasaran pembangunan, hingga perampasan tanah akan selalu terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Terdapat

berbagai tipologi konflik di antaranya yaitu perkebunan, pertanian, kehutanan, infrastruktur, properti, pertambangan hingga fasilitas militer. Kesemua tipologi tersebut akibat kelindan elit politik dan bisnis, praktik mafia tanah rakus tanah, disertai kekerasan berlebih yang meletakkan petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan dan masyarakat miskin lainnya.

Berikut merupakan salah satu konflik agraria yang sedang dialami oleh Kelompok Tani Lepar lau Tengah yang terpaksa berhadapan dengan PT Nirvana Memorial Nusantara yang bergerak dibidang pengadaan pekuburan elit. Dalam perjalannya terjadi peralihan hak atas kepemilikan tanah di atas tanah masyarakat seluas ± 75 Ha dengan dalil bahwa PT. Nirvana Memorial Nusantara telah melakukan Akta Jual Beli sebanyak 63 buah bidang tanah sebagai dasar terbitnya 63 Sertifikat HGB atas nama PT. Nirvana Memorial Nusantara. Akan tetapi temuan menariknya adalah tidak ada satupun orang-orang yang bertanda tangan pada ke-63 Akta Jual Beli (*sebagai dasar terbitnya 63 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Nirvana*) yang merupakan warga Desa Rambung Baru, malah warga lain yang berada di Desa lain. Belum lagi soal sertfikat tersebut terdaftar di Desa Bingkawan, padahal dilapangan sudah jelas secara faktual, lokasi PT Nirvana ada di Desa Rambung Baru. Kami sangat menduga kuat bahwa ini merupakan permainan Mafia Tanah. Secara letak geografis, lahan yang akan diolah tersebut merupakan dataran tinggi, yang sangat berpotensi kuat akan menimbulkan dampak lingkungan yang bekepanjangan.



Pada bulan April 2025 tepatnya tanggal 11, pihak Pamong Praja kabupaten Deliserdang melakukan penyegelan terhadap PT. Nirvana Memorial Nusantara karena tidak memiliki ijin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dari hal tersebut juga sangat terlihat jelas jika pihak PT tidak mengikuti aturan dan prosedur dalam proses pembangunannya. Masyarakat juga melakukan audiensi ke kantor pemerintahan kabupaten Deliserdang untuk bertemu dengan Bupati pada tanggal 30 April 2025, namun Bupati saat itu tidak di tempat dan masyarakat diterima oleh Satpol PP Deli Serdang, DPMPTSA Kabupaten Deli Serdang, Dinas CKTR Kabupaten Deliserdang, Bagian Hukum Setdakab Deliserdang, dan bagian tata pemerintahan setdakab Deli Serdang. Dalam audiensi yang dilakukan ada beberapa point yang disepakati dan disimpulkan dan akan ditindaklanjuti, yakni :

1. Mengundang kembali masyarakat dan pihak terkait seperti BPN, Kades untuk pembahasan sengketa lahan yang dimaksud

2. Dinas CKTR dan DPMPTSP tidak akan memproses izin sebelum sengketa lahan selesai
3. Satpol PP akan melakukan penindakan jika PT. Nirvana Memorial Nusantara melakukan aktivitas selama penyegelan.

Namun ternyata hasil pertemuan tersebut hanya untuk memberikan angin segar kepada masyarakat karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini Agustus 2025 mereka tidak menindaklanjuti perihal diatas yang disepakati, Bupati sampai saat ini masih sibuk dan belum bisa meluangkan sedikitpun waktu untuk mendengarkan keluhan masyarakat, dan satpol PP juga tidak ada melakukan penindakan apapun terhadap PT meskipun pihak PT masih terus melakukan aktivitasnya di dalam.

Masyarakat juga sudah melaporkan dan menggaungkan kasus yang mereka alami di tingkat nasional di bulan Mei 2025, Komnas HAM, Menteri Atr/Bpn dan Ombudsman RI adalah pemerintahan yang diharapkan dapat membantu mereka untuk lepas dari konfil agraria yang mereka alami saat ini.



Sampai dengan saat ini mereka terus berjuang untuk mempertahankan tanahnya, meskipun mereka masih menguasai lahan mereka namun rasa khawatir terus menghantui. Takut kapan saja tanah mereka di bulldoser oleh alat berat milik mereka, yang jelas pasti tidak akan mampu mereka halau hanya dengan tangan dan tubuh mereka.

Konstatering terus dipaksakan untuk dilakukan oleh PN Delierdang dan BPN Deliserdang, dan masyarakat terus menolak konstatering tersebut. Sudah 3 kali konstatering digagalkan oleh masyarakat dengan aksi. Namun perjuangan belum berakhir, selama ijin PT tidak dicabut dan belum terbit sertifikat atas nama masyarakat maka rasa 'ketakutan' akan terus menghantui mereka,

takut karena kapan saja lahan untuk 'orang mati' bisa menggusur mereka.

Masyarakat terus melawan, saat ini masyarakat telah melakukan pendumas di Polda Sumatera Utara, meskipun kinerja poldasu patut untuk dipertanyakan karena pengaduan mereka sengaja di 'peti es' kan karena sampai saat ini belum di proses. Gugatan perlawanan juga sedang bergulir, berharap Pengadilan Deliserdang menggunakan mata dan hati mereka dalam menangani proses hukum ini.

Menuju Desa Inklusif

Studi Banding Pemerintahan Desa di Yogyakarta

Oleh : Vionna Clarissa Br Ginting, S.H

Yayasan Ate Keleng memiliki beberapa bagian divisi yang focus dalam peningkatan kapasitas baik dalam meningkatkan kemampuan pribadi (*mindset*), ekonomi, maupun pelestarian lingkungan, salah satu divisi dalam Lembaga Yayasan Ate Keleng yaitu Divisi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dimana program divisi ini pendampingan kelompok rentan atau marjinal untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Untuk itu Yayasan Ate Keleng sendiri mengharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintahan Desa untuk bersama-sama membangun Desa Inklusif yang setiap pelaksanaan kegiatan atau pembangunan



memperhatikan kelompok rentan atau marjinal yang ada, Yayasan Ate Keleng sendiri sudah memiliki kelompok-kelompok kecil seperti kelompok disabilitas, kelompok perempuan, maupun pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS dan sudah memiliki kegiatan dalam bentuk peningkatan kapasitas serta ekonomi kelompok tersebut kelompok-kelompok tersebut dikategorikan sebagai marjinal atau rentan karena dirasa masih kurangnya pemenuhan hak-hak mereka di masyarakat.

Ketika mendengar kata inklusi, apa yang muncul di benak kita? Inklusi merupakan konsep yang menekankan pada pengakuan, bentuk penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan individu dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Hingga saat ini Indonesia sudah menggaungkan “Menuju Desa Inklusi”. Dengan maksud tidak ada lagi pendiskriminasian kepada lapisan masyarakat tertentu dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan adanya tujuan ini perlunya keikutsertaan pemerintahan desa dalam menciptakan desa inklusif maka perlu adanya penguatan terhadap Pemerintahan desa untuk diharapkan jadi garda terdepan dalam menciptakan desa inklusi.

Studi banding ini diikuti oleh pemdes dari 9 desa dampingan Yayasan Ate Keleng yaitu Desa Durin Serugun(Derek), Jandi Meriah, Payung, Tiga Pancur, Lingga Julu, Gurukinayan, Kutambelin, Salit, dan Sugihen. Peserta ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, maupun BPD, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-23 Mei 2025. Studi banding ini dilaksanakan dengan mengunjungi lembaga yang sama-sama memiliki kepedulian yang

sama mengenai kelompok marjinal seperti Lembaga Kalyana Mitra yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan PRYAKKUM serta SIGAB yang focus pada pemberdayaan disabilitas.

Banyak sekali hal yang didapatkan dalam studi banding ini, bagaimana lembaga-lembaga diatas berhasil dalam memperdayakan kelompok marjinal hingga mereka mandiri dan dapat mendapatkan hak-haknya. Ada beberapa desa yang dikunjungi untuk melihat langsung bagaimana pemberdayaan masyarakat yang berhasil dilakukan di desa. Seperti desa Kebonharjo yang berhasil dalam membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa(ODGJ) untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, Desa Banjarharjo yang memiliki program untuk mengurangi resiko stunting pada anak, dan Desa Purwoharjo yang berhasil membentuk sebuah Perdes yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dari KDRT. Hal ini tentu sangat baik jika dapat diterapkan oleh desa-desa yang menjadi dampingan Yayasan Ate Keleng itu sendiri.

Selain itu para pemerintahan desa juga diajak untuk mengenai kelompok perempuan yang dibentuk oleh Kalyana Mitra yaitu Panguyuban Perempuan Menoreh atau yang dikenal Guyub Permen, kelompok perempuan ini merupakan salah satu kelompok dampingan Kalyana Mitra yang dinilai sudah mandiri baik dalam pelaksanaan program ataupun berjejaring. Yayasan Ate Keleng sendiri juga sudah membentuk jaringan kelompok perempuan yang keanggotaannya merupakan seluruh kelompok perempuan yang ada didesa dampingan Yayasan Ate Keleng, jaringan ini bernama

Jaringan Perempuan Ate Keleng (JAPEKELENG), tentu kita mengharapkan kelompok ini nantinya juga dapat secara berkelanjutan menjalankan programnya sehingga mendukung perempuan menjadi perempuan yang berani, dan mandiri.



Pemerintah Desa juga diajak untuk melihat bagaimana desa-desa memprioritaskan pemberdayaan disabilitas dalam perjalanan desa, di salah satu desa yang bernama Desa Candi Ngasinan berhasil membentuk suatu perdes bagaimana kelompok disabilitas diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di desa. Dan



ada juga Desa Sabdodadi yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan bagi orang disabilitas. Dengan ada perhatian-perhatian yang khusus bagi pemerintah desa di Jawa Tengah dan

Yogyakarta ini menjadi pemacu bagi pemerintahan desa yang berkunjung bahwa kita juga mampu menciptakan hidup yang layak bagi kelompok marjinal, kita mampu untuk mengikutsertakan mereka dalam segala kegiatan yang ada di desa, menciptakan desa inklusi seharusnya tidak lagi menjadi hal yang sulit jika kita dapat bersinergi dalam memiliki kepedulian yang sama.

Mari menciptakan dunia yang indah dan aman bagi kelompok marjinal.

“Memberdayakan Kelompok Marginal Dalam Pembangunan Desa”

Oleh : Rupina Br Purba, S.PAK



Masyarakat marginal diartikan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau individu yang memiliki keterbatasan dalam bidang tertentu sehingga mempunyai posisi yang lebih rendah dan terabaikan dengan masyarakat secara umum dan salah satunya adalah kelompok perempuan, anak, lansia, odhiv (orang dengan hiv). Hal ini mengakibatkan mereka merasa dikucilkan/terpinggirkan dan diabaikan terutama dalam haknya sebagai warga masyarakat. Misalnya ketika adanya musrenbang ditingkat desa maka mereka sering terlupakan dan tidak diikutsertakan dalam musrenbang desa dan tidak dilakukan kunjungan atau diskusi dengan keluarga yang marginal.

Hal ini berdampak panjang artinya ketika desa musyawarah untuk membahas penggunaan anggaran dana desa maka hal –hal yang dibahas adalah seputar pembangunan-pembangunan (jalan keladang, jalan antar lorong dll), air minum, peralatan balai desa, kebutuhan PKK, karang taruna, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kebutuhan kaum marginal tidak akan tercover sebab pemerintah desa dan masyarakat hanya disibukkan oleh aturan aturan/model yang sudah dipersiapkan dari Kecamatan dan sisi lain kaum marginal khususnya kaum disabilitas tidak diundang untuk hadir dan tidak didiskusikan kepada mereka tentang kebutuhannya.

Kebutuhan kaum marginal seringkali diabaikan bahkan terlupakan, sebenarnya tanpa ada unsur kesengajaan (mendiskriminasi) mereka tetapi karena hal ini belum umum dilakukan di Sumatera Utara , khususnya di Kabupaten Karo. Sisi lain masih adanya keluarga kaum disabilitas yang menutupi keberadaan anaknya/keluarganya karena rasa malu sebab masih ada anggapan itu adalah aib keluarga. Hal ini kami temui / lihat dari diskusi-diskusi dengan kelompok dampingan, pemerintahan desa bahkan kecamatan dan ketika ada yang bersuara dalam musrenbang tentang kebutuhan disabilitas tidak diterima secara umum. Hal ini dilatarbelakangi karena belum ada informasi dari pihak kecamatan atau pendamping desa dan belum adanya keberanian dalam menambahkan format tersebut.

Hal ini dikarenakan pemerintahan desa dalam melakukan musrenbang desa dan menyusun anggaran dengan acuan yang

sudah dipersiapkan dari kecamatan yang dipandu oleh pendamping desa dan untuk kaum marginal khususnya kaum disabilitas belum ada diterakan sehingga mempersulit mereka untuk menambahkannya sebab ada ketakutan berdampak dalam pencairan anggaran dana desa yang berdampak buruk bagi masyarakat. Pemerintahan desa bersama BPD belum sepenuhnya memahami bagaimana dikatakan disabilitas sehingga jumlah penyandang disabilitas ditingkat desa juga belum ada.

Untuk itu YAK GBKP sesuai dengan program dalam pencapaian Perdes terpinggirkan melakukan diskusi-diskusi ditingkat pemerintahan desa, kelompok-kelompok OR, tingkat Kecamatan beserta dengan pendamping desa, juga hadir dalam musrenbang dan menjelaskan bagaimana kaum marginal ditingkat desa, apakah sudah diperhatikan. Disamping melakukan diskusi ditingkat desa, untuk memperdalam sumber daya manusia, YAK GBKP juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan mengundang Kepala desa wilayah Tanah Karo, Bidang Pemberdayaan Kabupaten, Dinsos untuk duduk bersama bagaimana supaya kita memandang sama dengan kaum disabilitas. YAK GBKP membuat program dengan membawa pemerintahan desa khususnya Kepala desa untuk melakukan studi tiru ke Pulau Jawa untuk melihat langsung bagaimana kaum disabilitas dan kelompok perempuan sudah mandiri dengan diperhatikan oleh pemerintah dan langsung dapat dukungan dari Kabupaten.

Dengan adanya hal –hal yang diatas maka seiring waktu di beberapa desa sudah berani menganggarkan program dan

kebutuhan kaum disabilitas dan kelompok perempuan walaupun masih dalam jumlah yang minim. Hal ini ditetapkan secara bersama sama dengan kelompok kaum marginal dengan mengundang perwakilan dusun tetapi setelah adanya pembahasan dalam musrenbang desa yang dihadiri juga oleh pihak kecamatan dan pendamping desa.

Dengan adanya Perdes marginal yaitu “PARTISIPASI PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN DESA” yang disahkan oleh BPD dan Kepala Desa setelah di sampaikan kepada Kecamatan, Kabupaten untuk pemberitahuan bahwa didesa tersebut sesuai dengan kewenangan desa (PERDES NO 3 TAHUN 2025) sudah ada Perdes yang baru. Selanjutnya kaum marginal (Disabilitas, perempuan dan anak) sudah ada program mereka yang tertera dalam APBDesa sesuai dengan kebutuhan mereka dan setiap kegiatan akan diupayakan untuk mengundang perwakilan pemerintahan desa.

Memperkuat keberadaan kaum marginal khususnya kelompok disabilitas dan Kelompok perempuan dilengkapi dengan SK dan pelantikan oleh Kepala Desa, sehingga setiap ada musyawarah/kegiatan ditingkat desa maka kelompok mereka juga sudah resmi mendapat undangan dan berhak hadir dan mengajukan pendapat dalam musyawarah desa. Sebagai tindak lanjutnya kaum marginal sudah dapat melakukan kegiatan dan membuat pertemuan berupa diskusi dan praktek dengan harapan untuk kedepannya kaum marginal tetap diperhatikan dan didukung keberadaannya dan dapat mandiri dalam ekonominya.

Kepengurusan di isi dari perwakilan pemerintahan desa, kaum disabilitas/keluarga dan pengurus Organisasi Rakyat dengan harapan supaya ketiga kelompok ini dapat saling mendukung. Misalnya ketika ada pendidikan keluar dari desa yang membutuhkan biaya maka akan didukung oleh kelompok OR karena organisasi marginal masih mudasebab anggaran dalam APB Desa hanya diperbolehkan untuk biaya kegiatan.

Kendala yang selalu di alami oleh kaum disabilitas dalam pengembangan sumber daya adalah dalam hal biaya/transport. Misalnya adanya program dari Dinas Tenaga kerja untuk melatih mereka sesuai dengan talentanya (menjahit, kursus computer, membuat kue dsb) mereka tidak mampu untuk menjangkaunya karena menyangkut ongkos, sebab Dinas Tenaga Kerja hanya menyiapkan konsumsi dan bahan. Untuk itulah harapan kita ditingkat desalah yang utama dan terutama untuk membantu kaum disabilitas, dengan membuat kegiatan mereka dan kedepannya mereka sudah mempunyai anggaran.

Menyangkut anggaran dalam APBDesa untuk kamu marginal maka mereka membuat laporan/pembukuan yang dipegang oleh bendahara dan dilaporkan kepada pemerintahan desa dan anggota, khususnya dalam musrenbang akan dilaporkan pertanggung jawaban keuangan dan perkembangan dari usaha mereka. Untuk kegiatan yang sudah berjalan misalnya : ternak ayam, pembuatan sabun cair, akan ditunjukkan kepada pemerintahan desa supaya mereka juga melihat hasil pekerjaan kaum marginal.

Harapan kedepan anggaran tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga untuk kemandirian kaum marginal dan tetap didukung oleh pemerintahan desa dan masyarakat dan tidak hanya 1 kali memperhitungkan anggaran bagi kaum marginal tetapi secara terus menerus. Di upayakan hasil usaha kaum marginal dipasarkan ditingkat desa dan didukung oleh masyarakat (misalnya untuk pembelian abun cair dana ayam merek beli dikelompok tsb). Usaha yang sudah mereka buat kita akan terus kerjasamakan dengan pihak Kecamatan sehingga sudah ada legislasi/label halal untuk dipasarkan secara nasional.

“Mengubah LIMBAH Menjadi ENERGI Di OR Lau Kelumat”

Oleh : Silvia Agnes Yolani, SPt

Desa Sukamakmur merupakan salah satu wilayah di Kecamatan sukakarya, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Desa Sukamakmur memiliki luas wilayah 516 Ha./Km. Desa Sukamakmur didominasi oleh daerah dataran rendah (web. Profil desa). Masyarakat desa sukamakmur antara lain adalah petani dan peternak. Peternak dampingan Yayasan Ate Keleng GBKP melakukan pemanfaatan limbah ternak sapi menjadi sumber energi (biogas) bagi kebutuhan rumah tangga. Biogas adalah energi alternatif diperoleh melalui dekomposisi limbah organik oleh bakteri anaerob.

Bahan baku bioagas adalah kotoran ternak (feses dan urine), yang di gabung dalam biogas digester. Digester biogas adalah tempat bahan-bahan organik diurai oleh bakteri secara anaerob (tanpa udara) menjadi gas CH_4 dan CO_2 . Dengan kata



lain, biogas digester adalah reaktor yang digunakan untuk mengolah limbah organik menjadi biogas.

Cara kerja digester biogas dimulai dari pengumpulan limbah organik, misalnya kotoran ternak yang sudah dicampurkan dengan air hingga menjadi lumpur. Kemudian dimasukkan ke dalam digester biogas. Nantinya di dalam digester biogas yang kedap udara terjadi fermentasi limbah oleh mikroorganisme anaerob.

Selanjutnya proses tersebut menghasilkan gas metan (CH_4). Gas metan yang ditampung di dalam digester disalurkan melalui pipa dan itulah yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor.



Biogas rumah tangga adalah inovasi yang mudah diterapkan di pedesaan atau kawasan pertanian peternakan. Di Desa Sukamakmur Or Lau kelumat ini menyadari bahwa mengadopsi biogas ini bukan hanya memberikan manfaat teknologi, tetapi juga

mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk masa depan lebih baik.

Biogas menjadi sumber energi yang bersih dan terbarukan. Gas yang dihasilkan tidak menimbulkan polusi dan hal ini tentu sangat mengurangi efek rumah kaca.

Kelebihan lain dari biogas adalah prosesnya yang alami, tidak perlu energi untuk proses membuatnya. Tidak hanya itu, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan biogas dapat diperbarui. Tanaman akan terus tumbuh, pupuk kandang, sisa makanan dan sisa tanaman juga berlimpah di lingkungan sekitar. Bahan-bahan tersebut menjadi bahan baku yang selalu tersedia dan menjadi pilihan yang cocok karena sangat berkelanjutan.

“Koperasi Sokong Ekonomi Rakyat”

oleh : Yuni Sartika Ginting, SE

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang kehidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan sesamanya manusia.

Koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1896 oleh R. Aria Wiraatmadja, seorang Patih (pejabat daerah) di Purwokerto yang mendirikan koperasi kredit membantu para pegawai negeri yang pada saat itu banyak terjerat utang ke Rentenir. Kemudian dikembangkan oleh banyak tokoh saat itu termasuk Mohammad Hatta yang dikenal juga sebagai Bapak Koperasi atas perannya dalam mempromosikan dan mengembangkan koperasi di Indonesia.

Koperasi dalam ekonomi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada

umumnya. Secara terperinci, berikut adalah ciri khas sebuah koperasi:

Badan Usaha	Merupakan suatu bentuk badan usaha, seperti halnya perusahaan pada umumnya.
Keanggotaan	Didirikan dan dimiliki oleh anggotanya, bukan oleh pihak luar
Modal	Berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan dari para anggota
Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan
Prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Keanggotaan yang sukarela dan terbuka• Pengelolaan demokratis• Pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang adil kepada anggota• Pendidikan perkoperasian.• Kerjasama antar koperasi.
Gerakan Ekonomi Rakyat	Koperasi merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Koperasi memiliki berbagai bentuk berdasarkan bidang usahanya. Beberapa bentuk koperasi **yang umum dijumpai antara lain koperasi konsumsi, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa**. Selain itu, koperasi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkatannya seperti koperasi primer, sekunder, dan tersier

❖ Berdasarkan Bidang Usaha:

1. **Koperasi Produsen** adalah jenis koperasi yang beranggotakan para produsen, baik itu produsen barang maupun jasa, yang bekerja sama untuk menghasilkan dan

memasarkan produk atau jasa mereka. Artinya, anggota tidak hanya sebagai pemilik tetapi juga sebagai penghasil barang atau jasa yang akan dijual melalui koperasi tersebut.

2. **Koperasi Konsumen** adalah jenis koperasi yang kegiatannya berfokus pada pemenuhan kebutuhan anggota akan barang dan jasa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi ini memungkinkan anggota untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, karena modal koperasi berasal dari iuran anggota.
3. **Koperasi Simpan-Pinjam (KSP)** adalah lembaga keuangan **bukan** bank yang kegiatannya berfokus pada menyediakan layanan simpanan dana dan pinjaman modal bagi anggotanya dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dari lembaga keuangan lainnya.
4. **Koperasi Pemasaran**, berfokus pada pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya, membantu menghubungkan produsen dengan konsumen.
5. **Koperasi Jasa** adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa, baik untuk anggota koperasi maupun masyarakat umum. Koperasi ini berfokus pada layanan atau jasa tertentu, bukan pada produk barang. Anggota koperasi berperan ganda, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa yang ditawarkan oleh koperasi.

❖ **Berdasarkan Tingkatan:**

1. **Koperasi Primer** adalah jenis koperasi yang anggotanya adalah **orang perorangan**, yang menjadi dasar dalam struktur koperasi dan berfokus pada pemberdayaan anggotanya dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial.
2. **Koperasi Sekunder** adalah jenis koperasi yang beranggotakan **badan hukum koperasi**, baik itu **koperasi primer** maupun **koperasi sekunder** lainnya. Koperasi sekunder dibentuk untuk melayani dan mendukung kegiatan koperasi primer, serta memiliki cakupan wilayah kerja yang lebih luas.
3. **Koperasi Tersier** adalah jenis koperasi yang beranggotakan **koperasi sekunder** dan berkedudukan di ibukota negara. Koperasi ini sering disebut juga sebagai induk koperasi. Koperasi tersier memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengawasi koperasi sekunder serta memberikan dukungan yang lebih luas, termasuk dalam hal keuangan dan pelatihan.

❖ **Bentuk Koperasi Lainnya**

1. **Koperasi Serba Usaha (KSU)**, merupakan jenis koperasi yang menjalankan berbagai bidang usaha, atau menggabungkan berbagai jenis usaha dalam satu koperasi, seperti simpan pinjam, penjualan kebutuhan pokok, dan lain-lain menurut Kontrak Hukum
2. **Koperasi Pertanian, Peternakan, Industri & Kerajinan, dll**, merupakan jenis koperasi yang usahanya berfokus pada bidang tertentu, seperti pertanian, peternakan, industri, sekolah, pegawai negeri atau koperasi unit desa.

Mengapa koperasi sokong ekonomi rakyat? karena selain tujuan pembentukannya untuk kesejahteraan anggota, koperasi juga menyediakan berbagai macam jenis penggolongan koperasi sesuai kebutuhan kelompoknya sehingga koperasi berpotensi berkembang, maju dan berkelanjutan. Berikut manfaat dan peran koperasi dalam perekonomian:

- **Meningkatkan Kesejahteraan Anggota**
Koperasi menyediakan akses ke berbagai layanan dan produk dengan harga terjangkau, serta memberikan manfaat ekonomi seperti sisa hasil usaha (SHU) yang adil.
- **Mendorong Pemberdayaan Ekonomi**
Koperasi membantu anggota, terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka melalui penyediaan modal, pelatihan, dan akses pasar.
- **Menciptakan Lapangan Kerja**
Kehadiran koperasi membuka peluang kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.
- **Mewujudkan Demokrasi Ekonomi**
Koperasi memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pembangunan.
- **Memperkuat Perekonomian Nasional**
Koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian rakyat yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- **Meningkatkan Kualitas Hidup**
Koperasi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya.

- **Mendorong Pendidikan Perkoperasian**

Koperasi berperan dalam memberikan pendidikan perkoperasian dan dunia usaha kepada anggota dan masyarakat.

- ❖ **Koperasi dan Credit Union**

Koperasi dan credit union (CU) pada dasarnya adalah lembaga keuangan berbasis anggota yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, bukan untuk keuntungan pemegang saham eksternal, dan keduanya menawarkan layanan simpan pinjam. Hanya saja secara fungsi, koperasi bisa memiliki berbagai bidang usaha, sedangkan CU secara spesifik bergerak di bidang simpan pinjam. Tentu usaha-usaha ini (selain simpan-pinjam) pasti akan mempengaruhi perkembangan sebuah lembaga keuangan.

Credit Union yang berbadan hukum koperasi sehingga tidak hanya berfungsi sebagai penyedia simpan pinjam, tetapi juga bisa melakukan pendampingan usaha yang memiliki kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi anggota dan pengelola asetnya, dan bahkan menjalankan usahanya sendiri untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial anggotanya.

“ bersama-sama dan tumbuh bersama sebagai pilar kekuatan ekonomi rakyat “

“Digitalization for Justice and Peace”

Oleh : Marisa Br Perangin-Angin, S.Kom



Apa itu digitalisasi?

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi atau data dari bentuk analog (seperti kertas, suara, gambar fisik) menjadi bentuk digital yang dapat diproses, disimpan, dan ditransmisikan oleh komputer. Secara sederhana, digitalisasi adalah mengubah sesuatu yang "non-digital" menjadi "digital"

[https://id.wikipedia.org/wiki/Digitisasi#:~:text=Digitisasi%20\(pendi%20gitan\)%20atau%20digitalisasi%20\(,maupun%20video%20menjadi%20bentuk%20digital.\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Digitisasi#:~:text=Digitisasi%20(pendi%20gitan)%20atau%20digitalisasi%20(,maupun%20video%20menjadi%20bentuk%20digital.))

- **Theological Foundation on Digitalization (Landasan Teologi Digitalisasi)**

Teologi Digital ialah salah satu studi tentang hubungan antara teologi dan teknologi digital. Bidang ini menjelaskan bagaimana teknologi digital mempengaruhi praktik keagamaan, pemahaman teologis.

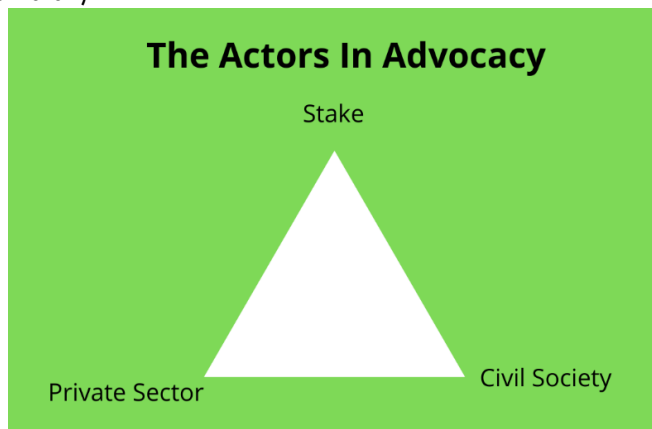
- **Communication Development in Asia (Perkembangan Komunikasi di Asia)**
Implikasi

Paradoks Perdamaian Digital.

Ruang digital bukan sekadar agama, tetapi juga area kekuatan baru dalam proses perdamaian.

Membingkai ulang literasi digital untuk keadilan bukan hanya tentang men-debug rumah, tetapi juga membangun empati, berpikir kritis, dan keterampilan resolusi konflik.

- **Advocacy for Justice and Peace** (Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian)



1. Merujuk pada pembahasan, yang umumnya diberlakukan oleh Negara terhadap kebebasan bertidak pada pelaku masyarakat sipil.

2. Banyak bidang kehidupan public yang dapat tersentuh oleh pembatasan tersebut

KPKC

1. Keadilan : Keadilan sosial memperjuangkan hak dan martabat semua orang, khususnya kaum miskin dan terpinggirkan, serta berupaya mengatasi ketidaksetaraan.
2. Perdamaian : mencangkup kedamaian batin dan kedamaian antar manusia dan antar bangsa.
3. Integritas ciptaan : menekankan pentingnya merawat bukti sebagai ciptaan Tuhan dan mempromosikan praktik berkelanjutan yang melindungi lingkungan untuk generasi sekarang dan akan mendatang.

Langkah Advokasi :

1. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM
2. Cari tahu apa akar permasalahannya, dampaknya dan Solusi Alternatifnya
3. Mengidentifikasi siapa actor yang terlibat, siapa yang di rugikan
4. Terapkan tujuan spesifik apa yang ingin dicapai dalam advokasi.

▪ Peran media dalam Advokasi

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengungkap Pelanggaran HAM
2. Memberi ruang suara bagi yang tertindas
3. Mengawasi kekuasaan
4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Pemahaman dasar tentang Digitalisasi

➤ **Pembuatan Konten**

a. Tentukan Tujuan Advokasi Anda

Tanyakan pada diri sendiri

b. Perubahan apa yang ingin Anda lihat?

c. Siapa yang perlu dipengaruhi (audiens)? Publik? Pemerintah? Kelompok Tertentu?

d. Pahami Audiens Anda

e. Konten berdasarkan Usia: Apakah mereka remaja? Orang tua? dll

➤ **Keputusan Media Sosial**

a. Platform: Di mana mereka berada? (IG, TikTok, YouTube, Twitter/Fb)

b. Nilai dan keyakinan: apa yang menggerakkan mereka secara emosional?

➤ **Susun pesan inti?**

a. Pesan Anda harus

b. Jelas

c. Emosional

d. Dapat ditindaklanjuti

e. Pilih platform yang tepat untuk audiens? Tergantung pada platform audiens, pilih satu atau lebih.

Contoh:

- Video Pendek (Tiktok, Reels)

- Grafik Penjelasan

- Kisah Testimonial

- Infografis & Fakta

- Poster Ajakan Bertindak.

➤ **Alat yang dapat di gunakan:**

1. Canva
2. Capcut/Inshot
3. Chat GPT
4. Google Trends



Gen Z, atau Generasi Z, adalah demografi yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka adalah kelompok demografis yang lahir setelah Milenial dan sebelum Generasi Alfa. Generasi ini dicirikan oleh pengalaman mereka tumbuh di era digital, sehingga sangat fasih menggunakan teknologi, media sosial, dan internet. Gen Z juga dikenal karena kesadaran sosial mereka, keinginan untuk otentisitas, dan kecenderungan untuk mendukung aktivisme politik dan sosial melalui media sosial. (Web media)

Pada Bulan Juli tepatnya 21-26 Juli 2025 yang lalu, telah dilaksanakan “Workshop Digital Literacy for Justice and Peace” . Yang Dimana lebih banyak peserta yang mengikuti dari Gen Z (ada juga yang tidak) berasal dari beberapa utusan Gereja seperti HKBP, GPKB, GKPI, HKI, GKE, GKJTU, GKJW, Sri Lanka, Filipina, GMKI, GKPPD, GKPS, GKPA, GKI Tanah Papua, GKPM, BNKP dan GBKP. Para peserta yang hadir



diberikan pengetahuan terkait memahami cara menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab dalam perspektif keadilan dan perdamaian. Secara spesifik juga dalam workshop ini bertujuan untuk Meningkatkan

pemahaman peserta dalam pemanfaatan media digital pada perspektif keadilan dan perdamaian, Meningkatkan keterampilan peserta dalam membuat konten media sosial sebagai media promosi, berjuang untuk keadilan dan perdamaian, Meningkatkan kemampuan peserta dalam mendistribusikan konten di semua platform media sosial. Pada hari ke empat sebelum finalisasi tugas konten setiap peserta, diajak berkunjung ke salah satu LSM yang ada di Jakarta yakni Greenpeace, berbagi dan sharing ilmu Bersama dengan staf yang ada di Greenpeace tersebut.

Langkah Awal dalam Memulai Perubahan Besar “Ending Plastic Pollution”

Oleh : Sriulina Br Sembiring, S.Tr.P

Permasalahan sampah sudah lama menjadi isu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah, baik itu dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, perdagangan, hingga kegiatan industri. Sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik bisa menimbulkan dampak yang serius, mulai dari pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas kesehatan, hingga bencana banjir ketika saluran air tersumbat. Seringkali kita mendengar keluhan tentang sungai yang penuh sampah plastik, jalan yang kotor, atau bau menyengat dari tumpukan sampah yang dibiarkan menumpuk di sudut-sudut pemukiman. Situasi ini membuat kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah menjadi semakin mendesak.

Salah satu solusi yang kini banyak diperkenalkan kepada masyarakat adalah pembentukan bank sampah. Konsep bank sampah ini sebenarnya sederhana, tetapi membawa manfaat yang besar. Idennya adalah menjadikan sampah sebagai sesuatu yang tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi dipilah, dikumpulkan, dan disetorkan ke sebuah tempat yang disebut bank sampah. Mekanisme ini mirip seperti bank pada umumnya, hanya saja yang ditabung bukan uang melainkan sampah yang sudah dipilah, terutama sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, kertas, kaleng, atau logam dan lain-lain. Sampah-sampah itu kemudian

ditimbang, dicatat, dan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Pada waktu tertentu, masyarakat bisa menukarkan tabungan tersebut dengan uang tunai atau barang kebutuhan lain sesuai kesepakatan.

Sebelum bank sampah dapat benar-benar berjalan, tentu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi langkah awal yang sangat penting karena tidak semua orang memahami konsep ini. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai, sehingga langsung dibuang bercampur antara organik dan anorganik. Melalui sosialisasi, masyarakat diperkenalkan pada pemahaman baru bahwa sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Sosialisasi juga memberikan pengetahuan mengenai cara memilah sampah, jenis-jenis sampah yang bisa diterima oleh bank sampah, serta bagaimana mekanisme tabungan sampah dijalankan.

Selain sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan, sosialisasi juga bertujuan membangun rasa kebersamaan. Bank sampah tidak mungkin berhasil apabila hanya dijalankan oleh segelintir orang. Perlu adanya partisipasi aktif seluruh warga agar program ini dapat berjalan secara konsisten. Sosialisasi biasanya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi, memberikan contoh langsung cara memilah sampah, hingga memperlihatkan kisah sukses bank sampah yang telah berjalan di daerah lain. Dengan cara ini, warga menjadi lebih termotivasi dan yakin bahwa program serupa juga bisa berhasil di lingkungan mereka.

Manfaat dari keberadaan bank sampah sangatlah banyak. Dari sisi lingkungan, bank sampah membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari sisi kesehatan, lingkungan yang bersih akan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh sampah, seperti diare, demam berdarah, atau penyakit kulit. Dari sisi sosial, bank sampah mampu menumbuhkan semangat gotong royong karena masyarakat bekerja sama menjaga kebersihan lingkungannya. Dari sisi ekonomi, tentu masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari sampah yang disetorkan. Bahkan di beberapa daerah, keuntungan dari bank sampah digunakan untuk kegiatan sosial, seperti membantu biaya sekolah anak-anak, mendukung kegiatan keagamaan, atau membiayai perbaikan fasilitas umum.

Yayasan Ate Keleng melalui Divisi Lingkungan Hidup Terkait Perubahan Iklim dan Pengelolaan Sampah dan Limbah (LHPPS) telah melakukan sosialisasi pembentukan bank sampah di beberapa desa yakni, Desa Barung Kersap, Desa Sukatendel, Desa Susuk, Desa Kutambelin, Desa Sibolangit dan Desa Sukamaju. Desa tersebut telah memiliki bank sampah sesuai keputusan bersama dengan masyarakat karena pada saat berlangsungnya sosialisasi tentu saja segala lapisan masyarakat turut hadir. Ide pembentukan bank sampah ini sangat didukung oleh pemerintah desa di masing-masing desa tersebut.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Divisi LHPPS juga dibantu oleh kehadiran Narasumber dari Bank Sampah Induk Moderamen GBKP Moderamen yang tentunya juga telah bekerja sama dengan YAK dalam menangani permasalahan sampah.

Manager Bank Sampah Induk Moderamen GBKP yaitu Kalva Pelawi menyampaikan bahwa bank sampah merupakan langkah konkret dalam mengelola sampah karena manfaat dari bank sampah sangat banyak seperti yang kita telah bahas sebelumnya. Dan beliau menyatakan bahwa BSI GBKP siap untuk menjemput sampah ke desa-desa yang sudah memiliki bank sampah dengan aturan tonase sampah paling sedikit 500kg agar memadai biaya operasional mereka, karena masyarakat merasa khawatir jika sampah sudah terkumpul siapakah yang akan membeli sampah tersebut.

Sosialisasi juga menjadi momen penting untuk membangun aturan Bersama. Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan Keputusan dan aturan bersama seperti:

1. Masyarakat sepakat untuk membentuk bank sampah
2. Sudah terpilih kepengurusan bank sampah
3. Pembuatan SK pengurus bank sampah oleh pemerintah desa
4. Waktu pencairan uang tabungan
5. Pembuatan nama bank sampah
6. Jadwal penabungan dan sejak kapan akan dimulai penabungan

Melihat antusias masyarakat dan pemerintah desa Divisi LHPPS merasa bahwa program ini akan berkembang dan berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar dapat mengumpulkan, memilah dan menjual sampahnya dimulai dari sampah rumah tangga mereka sendiri. Sebagai informasi lanjutan bahwa nasabah bank sampah memang lebih ditargetkan kepada anak-anak dikarenakan anak-anak memiliki jiwa kompetisi yang

tinggi dan berharap karakter untuk mencintai lingkungan juga mulai terbentuk sejak dini sebagai salah satu wujud dari pendidikan lingkungan sejak dini kepada anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus desa bahkan bangsa dan negara ini.

Pada akhirnya, sosialisasi pembentukan bank sampah bukan hanya soal mengenalkan sebuah program baru, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap masalah, justru bisa menjadi sumber manfaat apabila dikelola dengan bijak. Sosialisasi mengajarkan bahwa perubahan kecil, seperti memilah sampah di rumah, dapat memberi dampak besar bagi lingkungan. Melalui bank sampah, masyarakat belajar untuk lebih peduli, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Harapan besar Divisi LHPPS dari adanya sosialisasi ini adalah lahirnya sebuah gerakan bersama yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Bank sampah bukan sekadar tempat menabung sampah, tetapi juga wadah kebersamaan, sarana pemberdayaan ekonomi, dan simbol kepedulian lingkungan. Dengan dukungan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta, bank sampah bisa menjadi salah satu solusi nyata dalam mengurangi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Sosialisasi hanyalah langkah awal, tetapi langkah awal yang penuh makna karena dari sinilah kesadaran tumbuh dan perubahan besar dapat dimulai.



**“Selamat Memperingati Hari Tani Nasional”
24 September 2025**



Yayasan Ate Keleng GBKP



Yayasan Ate Keleng/PARPEM GBKP



yakparpem.org



Yayasan Ate Keleng GBKP